



Membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui Dialog Lintas Agama dan Budaya di Tengah Berbagai Tantangan di Indonesia

Dino¹, Mayyadi²

Program Studi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Adab,
Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Kalimantan Barat^{1,2}

*Email gustinadadino@gmail.com; mayyadi380@gmail.com

Diterima: 27-06-2026 | Disetujui: 03-07-2026 | Diterbitkan: 05-07-2026

ABSTRACT

Interfaith harmony is vital for the continuity of national life in Indonesia, a country characterized by religious, ethnic, and cultural diversity. This article examines the concept of interfaith harmony, the role of interfaith and intercultural dialogue in maintaining social harmony amidst contemporary challenges that hinder such harmony, and strategies that stakeholders can adopt to strengthen it. A descriptive-qualitative approach was employed, utilizing a literature review to analyze various scholarly works relevant to the topic. The analysis reveals that interfaith and intercultural dialogue—grounded in principles of equality, openness, honesty, and the acknowledgment of differences—effectively erodes prejudice, builds mutual trust, and prevents protracted interfaith conflicts. However, these efforts face serious challenges, including rising intolerance and radicalism, the exploitation of digital platforms to spread hoaxes and hate speech, the political manipulation of religious sentiment to secure power, and a lack of understanding regarding inclusive religious values within certain social segments. Consequently, collaboration among the government, religious leaders, educational institutions, the public, and mass and social media is essential to sustain harmony. The article recommends strengthening the institutional capacity of the Interfaith Harmony Forum (FKUB), integrating religious moderation values into educational curricula, and leveraging digital technology to extend the reach of tolerance-focused dialogue to the younger generation.

Keywords: *Interfaith Harmony, Interfaith Dialogue, Tolerance, Religious Moderation, National Integration.*

ABSTRAK

Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu bagian yang amat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang majemuk secara agama, etnis, dan budaya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep kerukunan umat beragama, peran dialog lintas agama dan budaya dalam memelihara harmoni sosial, di tengah berbagai tantangan kontemporer yang menghambat terciptanya kerukunan, serta strategi yang dapat ditempuh oleh berbagai pihak yang berpentingan untuk memperkuatnya. Pendekatan deskriptif-kualitatif diaplikasikan dalam penelitian ini dengan mengandalkan studi literatur guna menelaah beragam literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik bahasan. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai referensi pustaka tersebut, ditemukan bahwa dialog lintas agama dan budaya, yang dilandasi oleh prinsip kesetaraan, keterbukaan, kejujuran, dan pengakuan atas perbedaan, terbukti efektif dalam mengikis prasangka, membangun rasa saling percaya, serta mencegah terjadinya konflik antarumat beragama yang berkelanjutan. Namun demikian, upaya ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan serius, seperti menguatnya intoleransi dan radikalisme, tindakan eksploitasi platform digital dalam mendistribusikan narasi hoaks serta ekspresi kebencian, pemanfaatan sentimen keagamaan secara politis demi meraih hegemoni kekuasaan, sekaligus minimnya pemahaman nilai-nilai agama yang inklusif pada lapis sosial tertentu. Dengan demikian diperlukan kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, masyarakat, serta media massa dan media sosial dalam merawat kerukunan secara

berkelanjutan. Artikel ini merekomendasikan penguatan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), integrasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan, serta optimalisasi teknologi digital sebagai sarana memperluas jangkauan dialog toleransi kepada generasi muda.

Kata kunci: Kerukunan Umat Beragama, Dialog Lintas Agama, Toleransi, Moderasi Beragama, Integrasi Nasional.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Dino, D., & Mayyadi, M. (2026). Membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui Dialog Lintas Agama dan Budaya di Tengah Berbagai Tantangan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 2525-2535. <https://doi.org/10.63822/aa7pgt28>

PENDAHULUAN

Eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sangat bergantung pada kokohnya kerukunan umat beragama selaku salah satu tiang penyangga fundamental. Struktur geografis Nusantara yang membentang dalam bentuk kepulauan luas dengan jumlah penduduk masif secara sosiologis membentuk lanskap sosial yang majemuk. Corak pluralitas ini terlihat dari keterbelahan demografis ke dalam spektrum teologis yang kaya, mulai dari pemeluk agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Khonghucu, sekaligus mencakup keberadaan berbagai komunitas penghayat kepercayaan lokal yang masih dirawat secara turun-temurun oleh masyarakat adat. Di satu sisi, pluralitas tersebut merupakan sebuah anugerah tak ternilai yang patut diapresiasi, namun di sisi lain, fenomena ini menyimpan potensi friksi sosiokultural laten apabila tidak diimbangi dengan manajemen pengelolaan yang bijaksana. Menyadari status kemajemukan kultural dan spiritual tersebut, Indonesia sejak awal kemerdekaannya telah memproyeksikan diversitas sebagai sebuah instrumen integrasi, bukan disintegrasi. Formulasi fondasi negara serta instrumen konstitusional oleh para pendiri bangsa dirancang secara cermat dengan merefleksikan heterogenitas sosial ini, melahirkan doktrin-doktrin kebangsaan yang mampu mengayomi segenap lapisan masyarakat tanpa mengelompokan perbedaan kultural, etnis, maupun teologis.

Dengan demikian, dinamika dalam memelihara stabilitas dan kedamaian interaksi antarumat beragama di Nusantara kerap kali menghadapi berbagai tantangan. Seiring berjalannya waktu, perubahan zaman memicu kemunculan rintangan-rintangan baru yang nyata baik dalam bentuk sentimen intoleransi, infiltrasi doktrin radikal, pemanfaatan ruang siber guna menyebarkan narasi kebencian, hingga eksploitasi identitas keagamaan demi syahwat serta kepentingan politik praktis. Hal ini jika dibiarkan tanpa adanya intervensi, distorsi sosial tersebut, tentu akan berpotensi menggerus jalinan solidaritas kebangsaan yang telah lama mengakar sekaligus mengancam integrasi nasional. Sebagai respons atas isu-isu tersebut, implementasi dialog lintas agama dan budaya dinilai menjadi mekanisme yang solutif serta transformatif guna melanggengkan harmoni sosial. Melalui ruang komunikasi ini, perbedaan teologis maupun kultural tidak lagi diposisikan sebagai ancaman yang destruktif, melainkan dijadikan katalisator untuk saling berinteraksi, memahami, dan memupuk rasa saling percaya antarkelompok. Forum inklusif ini memberikan kesempatan bagi setiap penganut agama, komunitas adat dan budaya untuk mengekspresikan perspektif mereka secara demokratis, sekaligus menuntut kesediaan mendengarkan sudut pandang entitas lain dengan objektivitas intelektual dan kelapangan hati.

METODE PENELITIAN

Guna membedah topik yang dikaji secara komprehensif, investigasi ilmiah ini bertumpu pada koridor metodologi kualitatif melalui teknik riset dokumenter (*library research*). Prosedur operasional dalam model ini dijalankan dengan menginventarisasi, mengevaluasi, sekaligus membedah dokumen-dokumen tekstual yang memiliki korelasi kuat terhadap fokus bahasan, sehingga peneliti tidak perlu melakukan pengamatan langsung di ranah empiris. Orientasi metodologis ini diambil secara sengaja agar selaras dengan target utama riset, yakni menguliti secara substansial mengenai gagasan integrasi sosial antarpenganut agama, kontribusi nyata dari komunikasi multikultural dan teologis, sekaligus pemetaan hambatan beserta formulasi taktis dalam memperkuat hubungan tersebut menggunakan pijakan berbasis landasan konseptual dan data empiris terdahulu.

Konstruksi basis data dalam kajian ini sepenuhnya memanfaatkan data sekunder yang dihimpun dari khazanah kepustakaan akademik. Cakupan referensi tersebut meliputi artikel berkala ilmiah domestik, risalah simposium, buku teks, hingga instrumen regulasi resmi negara yang berkaitan erat dengan dinamika koeksistensi religius, aktualisasi moderasi beragama, serta ruang komunikasi teologis di ruang publik Indonesia. Penjaringan rujukan dilakukan secara selektif atas dasar keselarasan substansi melalui optimalisasi mesin pencari literatur digital *Google Scholar*. Pada tahapan pengumpulan data, peneliti menerapkan mekanisme pelacakan digital, anotasi mendalam, dan dokumentasi sistematis terhadap pustaka terpilih, yang kemudian dipetakan ke dalam beberapa klaster tematik: formulasi konseptual kerukunan antarumat beragama, pilar filosofis beserta aturan legal yang mengikat, dinamika komunikasi lintas iman dan kultural, hambatan sosial masa kini, hingga rumusan taktis bagi para aktor penggerak, baik pada level personal, kolektif, maupun kelembagaan. Sementara itu, operasionalisasi pengolahan data bersandar pada teknik analisis isi bercorak deskriptif-kualitatif. Proses ini dijalankan dengan mengintegrasikan struktur informasi, menafsirkan makna implisit, dan merangkum benang merah dari seluruh temuan pustaka agar diperoleh kesimpulan yang utuh, logis, dan terstruktur mengenai model penguatan harmoni sosial melalui forum dialog multikultural di tengah rumitnya disrupsi sosial-keagamaan kontemporer di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kerukunan Umat Beragama

1. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan berakar dari kata "rukun" yang merepresentasikan keadaan yang damai, harmonis, bebas dari pertikaian, serta adanya keselarasan batin untuk menggapai kemaslahatan bersama. Secara substansial, kerukunan umat beragama diartikan sebagai tatanan relasi sosial antar-pemeluk agama yang dibangun di atas fondasi *mutual understanding*, sikap saling menghormati, serta pengakuan atas kesetaraan hak dalam menjalankan ritual peribadatan masing-masing, yang diiringi dengan sinergi aktif dalam berkehidupan sosial.

Pemahaman tentang kerukunan tidak boleh disalahartikan sebagai upaya penyeragaman teologis atau asimilasi identitas menjadi satu entitas tunggal yang monolitik. Sebaliknya, paradigma ini justru mengandaikan adanya penerimaan yang tulus terhadap pluralitas sebagai sebuah keniscayaan yang nyata, dengan dibarengi oleh yang berkomitmen menciptakan ruang komunal demi koeksistensi yang damai. Komponen utama yang menggerakkan konsep ini adalah toleransi, yakni sebuah sikap yang menghormati dan membiarkan eksistensi pandangan, dogma, atau ritus kelompok lain yang berbeda tanpa harus meleburkan diri atau menyetujui doktrin tersebut.

Sikap saling menghormati memanifestasikan dirinya dalam bentuk pemberian jaminan penuh terhadap hak-hak fundamental setiap individu untuk meyakini serta mengamalkan ajaran teologisnya tanpa adanya intervensi maupun intimidasi dari kelompok mana pun. Di samping itu, kondisi lingkungan yang damai menggambarkan sebuah runag lingkup sosial di mana berbagai kelompok keyakinan sanggup mengaktualisasikan rutinitas spiritual dan aktivitas sosial mereka secara berdampingan tanpa memicu ketegangan.

2. Landasan Kerukunan di Indonesia

Kerangka operasional kerukunan umat beragama di Indonesia ditopang oleh pilar filosofis dan yuridis yang sangat kokoh. Kedudukan Pancasila yang merupakan sebagai falsafah hidup bangsa, khususnya manifestasi sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menjadi penanda otentik bahwa Indonesia merupakan entitas bangsa yang religius serta menaruh penghormatan pada eksistensi Tuhan melalui beragam manifestasi kepercayaan yang dipeluk warganya. Seluruh esensi nilai dalam Pancasila secara integratif juga menggarisbawahi urgensi kohesi nasional, kemanusiaan yang beradab, serta keadilan distributif yang menjadi pemandu dalam membina hubungan antarumat beragama yang harmoni

Di level hukum positif, Pasal 29 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bertindak sebagai rujukan hukum tertinggi. Ketentuan pada ayat (1) menegaskan komitmen negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan legitimasi pada ayat (2) memberikan garansi kemerdekaan penuh bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan keyakinan teologis serta kepercayaannya masing-masing. Proteksi konstitusional ini menjadi jaminan yuridis yang kuat bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengekspresikan kehidupan spiritual mereka bebas dari rasa cemas dan perlakuan diskriminatif.

Lebih jauh lagi, artikulasi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna "berbeda-beda tetapi tetap satu" berfungsi sebagai spirit pengikat yang mengafirmasi bahwa pluralitas, baik dalam lanskap religi maupun kultural, bukanlah batu sandungan bagi integrasi nasional, melainkan kekayaan orisinal yang memperkaya jati diri bangsa Indonesia. Ketiga pilar utama ini, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika berkelindan secara sinergis menjadi fondasi kokoh bagi keberlangsungan kerukunan umat beragama di tanah air.

Dialog Lintas Agama dan Budaya sebagai Sarana Membangun Kerukunan

1. Dialog Lintas Agama

Konseptualisasi dialog lintas agama merujuk pada sebuah instrumen komunikasi dan interaksi timbal balik yang diimplementasikan secara inklusif, jujur, serta setara di antara para penganut keyakinan yang berbeda dengan orientasi untuk saling mengenal, memahami, dan memelihara relasi yang harmonis. Forum interaksi ini sama sekali tidak didesain guna menguji kebenaran dogmatis absolut atau menyinkretiskan ajaran-ajaran teologis, melainkan murni untuk menumbuhkan titik temu pemahaman bersama di tengah realitas perbedaan iman yang eksis. Sasaran fundamental dari penyelenggaraan dialog lintas agama mencakup upaya memperluas cakrawala pandang keagamaan internal masing-masing komunitas, mengeliminasi miskonsepsi serta kecurigaan primordial akibat minimnya intensitas komunikasi, sekaligus menginisiasi kolaborasi riil dalam merespons problematika kemanusiaan universal seperti kemiskinan ekstrem, mitigasi bencana alam, dan ketimpangan sosial.

Supaya forum komunikasi ini mampu membuahkan hasil optimal, terdapat sekumpulan aksioma dasar yang wajib diinternalisasi oleh segenap partisipan. Pertama adalah asas ekuitas (kesetaraan), di mana seluruh entitas yang terlibat menempati posisi yang setara tanpa adanya dominasi atau superioritas dari salah satu kelompok. Kedua, asas inklusivitas (keterbukaan), yang menuntut kesediaan setiap aktor untuk menelaah opini pihak lain tanpa distorsi prasangka. Ketiga, asas otentisitas (kebenaran), yakni keberanian mengekspresikan pandangan spiritual secara jujur tanpa manipulasi teologis. Keempat, asas rekognisi perbedaan, yang diwujudkan dengan tidak memaksakan klaim kebenaran sepihak kepada entitas lain.

2. Dialog Lintas Budaya

Di samping ranah spiritual, variabel kultural turut memegang peranan krusial dalam merajut jalinan perdamaian di Indonesia. Urgensi dialog lintas budaya menitikberatkan pada aspek penghormatan terhadap pluralitas adat istiadat, pranata tradisi, variasi bahasa, serta ekspresi kesenian yang tumbuh subur di ruang publik. Realitasnya, setiap kelompok etnis di Nusantara memiliki kekhasan kebudayaan yang polanya sering kali beririsan kuat dengan doktrin dan ritual keagamaan yang mereka anut.

Korelasi antara entitas budaya dan dinamika religiusitas terjalin secara resiprokal dan mendalam, mengingat implementasi nilai-nilai keagamaan kerap kali diekspresikan melalui instrumen kearifan lokal, seperti ritus adat, seni pertunjukan tradisional, hingga upacara keagamaan yang terakulturasi dengan tradisi setempat. Konsekuensinya, diskursus dialog lintas budaya tidak dapat dinegasikan dari dialog lintas agama, karena kedua komponen ini saling menguatkan dalam membentuk cara pandang masyarakat yang inklusif terhadap realitas perbedaan dan keberagaman.

3. Manfaat Dialog

Aktivitas dialog lintas agama dan budaya mentransfer kontribusi yang sangat signifikan bagi ketahanan kerukunan nasional. Pertama, proses ini terbukti mampu mengikis sentimen negatif dan stereotip peyoratif yang kerap kali muncul akibat defisitnya pengetahuan substantif mengenai dogma dan ritus kelompok keagamaan lain. Melalui ruang komunikasi tatap muka, distorsi informasi dapat diluruskan sehingga melahirkan pemahaman holistik.

Kedua, jalinan interaksi ini mampu mengeskalasi derajat *mutual trust* (saling percaya) antar-komunitas pemeluk agama, di mana kepercayaan tersebut bertindak sebagai modal sosial krusial dalam memupuk kerja sama dan kohesi sosial di masyarakat yang majemuk. Ketiga, forum ini memiliki fungsi sebagai norma dalam meredam potensi konflik berbasis agama, sebab keberadaan kanal komunikasi yang intensif memungkinkan friksi-friksi awal diselesaikan secara damai sebelum eskalasinya membesar menjadi benturan terbuka. Keempat, secara makro, dialog ini memperkokoh integrasi nasional dengan cara menyuburkan rasa kebersamaan selaku warga negara Indonesia, melampaui batas-batas perbedaan teologis maupun kultural yang melekat.

Tantangan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

1. Intoleransi dan Radikalisme

Salah satu hambatan krusial yang merintangai kontinuitas pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah menguatnya kecenderungan sikap eksklusivitas pada segelintir kelompok sosial. Anomali perilaku ini dicirikan oleh kebiasaan membatasi diri dari interaksi sosial dengan kelompok keimanan lain, bahkan memposisikan keberadaan entitas luar tersebut sebagai ancaman terhadap kemurnian akidah internal. Sikap eksklusif yang tidak terkendali ini dapat bermutasi menjadi tindakan intoleransi yang nyata, seperti penolakan terhadap pemanfaatan atau pendirian tempat peribadatan, boikot atas kegiatan spiritual kelompok lain, hingga tindakan diskriminasi dalam relasi sosial sehari-hari.

Fenomena tersebut diperparah oleh penetrasi doktrin ekstrem yang menginterpretasikan teks-teks keagamaan secara rigid, tekstual, dan sempit, dengan memanfaatkan situasi sosial-politik tertentu sebagai justifikasi. Paham-paham radikal semacam ini umumnya diseminasikan secara terstruktur melalui jejaring tertutup dan menyasar segmen lapisan masyarakat usia muda yang sedang berproses di dalam fase rekonstruksi identitas diri, sehingga menciptakan klaster masyarakat yang rentan terpapar radikalisasi.

2. Penyalahgunaan Media Sosial

Akselerasi teknologi informasi dan komunikasi turut menghadirkan disrupsi baru bagi stabilitas kerukunan umat beragama. Platform media sosial yang pada hakikatnya didesain untuk merekatkan jalinan komunikasi antar-individu, kini justru sering kali dieksploitasi oleh aktor tak bertanggung jawab demi menyebarkan berita bohong (hoaks) yang bermuatan sentimen keagamaan sensitif. Diseminasi hoaks tersebut memiliki kecepatan tinggi dalam memantik sentimen emosional publik serta memperkeruh konfrontasi antar-kelompok penganut keyakinan.

Fenomena disinformasi ini diperparah dengan masifnya produksi narasi kebencian yang mendiskreditkan kelompok keagamaan tertentu di lanskap digital. Ujaran kebencian tersebut tidak jarang dikombinasikan dengan narasi provokatif berbasis sentimen SARA yang sengaja dirancang untuk memicu gesekan horizontal di akar rumput. Karakteristik media sosial yang memiliki daya sebar instan dan sukar diintervensi sepenuhnya menjadikan dampak destruktif dari fenomena digital ini semakin kompleks untuk ditanggulangi

3. Politik Identitas

Hambatan laten lain yang memiliki daya rusak tidak kalah masif adalah instrumentalisasi nilai-nilai keagamaan sebagai komoditas politik praktis. Dalam perhelatan kontestasi elektoral, baik pada skala daerah maupun nasional, isu-isu teologis kerap dieksploitasi oleh elite tertentu guna memobilisasi dukungan massa dengan cara membelah masyarakat berdasarkan garis demografi keagamaan. Politisasi agama semacam ini berpotensi melahirkan polarisasi sosial yang ekstrem di masyarakat, bahkan mampu mengoyak tatanan relasi sosial-kultural warga yang telah harmonis selama puluhan tahun. Dampak negatif dari artikulasi politik identitas ini tidak bersifat temporer selama masa kampanye saja, melainkan sering kali menorehkan trauma sosial mendalam yang membutuhkan waktu pemulihan sangat panjang. Solidaritas sosial masyarakat yang sebelumnya terjalin kokoh dapat mengalami disintegrasi akibat sentimen sektarian yang sengaja dipertajam demi meraih ceruk suara elektoral sepihak.

Faktor penghambat selanjutnya bersumber dari rendahnya indeks literasi keagamaan di sebagian lapisan masyarakat. Kesalahpahaman dalam mempersepsikan ajaran spiritual kelompok lain sering kali bukan didasari oleh intensi jahat, melainkan murni akibat keterbatasan akses informasi yang valid mengenai esensi dogma dan ritus kelompok luar tersebut. Defisit pengetahuan ini menjadi semakin parah akibat minimnya budaya berdialog di ruang publik, di mana interaksi lintas agama masih dipandang tabu atau dihindari oleh kalangan tertentu akibat fobia sosial yang tidak berdasar secara ilmiah.

Strategi Memupuk Kerukunan Melalui Dialog

Aparatur negara memegang otoritas sentral dalam mengkonstruksi ekosistem sosial yang kondusif bagi kerukunan umat beragama. Implementasi langkah taktis yang dapat ditempuh adalah merumuskan sekaligus menegakkan regulasi yang memberikan jaminan perlindungan mutlak bagi kebebasan beragama segenap warga negara, tanpa mengesampingkan kelompok minoritas maupun komunitas penghayat kepercayaan lokal. Kebijakan publik tersebut wajib dibarengi dengan tindakan penegakan hukum yang tegas dan imparial terhadap setiap manifestasi tindakan diskriminatif serta intoleransi di ruang publik

Selain instrumen hukum, optimalisasi peran kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat regional menjadi agenda strategis yang mendesak untuk terus ditingkatkan. FKUB memikul fungsi krusial sebagai ruang komunikasi dan mediasi antar-pemeluk agama dalam meredam serta menyelesaikan rupa-rupa problematika sosio-keagamaan di tingkat lokal, sehingga eksistensinya

memerlukan penguatan komprehensif, baik dari aspek peningkatan kapasitas manajerial maupun sokongan alokasi anggaran belanja operasional.

1. Peran Tokoh Agama

Para pemuka agama mempunyai pengaruh sosio-kultural yang sangat masif dalam mengarahkan orientasi berpikir serta perilaku umatnya. Oleh sebab itu, para pemuka agama dituntut menjadi teladan (*role model*) dalam menerapkan nilai-nilai toleransi, yang diaktualisasikan baik melalui narasi khotbah maupun tindakan konkret di lingkungan sosial. Keteladanan substantif ini diproyeksikan memberikan dampak persuasif yang jauh lebih efektif dibandingkan sekadar seruan formalistik normatif belaka. Di samping aspek keteladanan individual, para pemuka agama juga harus proaktif dalam menginisiasi jalinan kemitraan lintas agama, yang diwujudkan dalam bentuk perancangan agenda bakti sosial gabungan, penyelenggaraan rembuk dialogis periodik antartokoh agama, serta kolaborasi aktif dalam menanggapi dinamika problem kemasyarakatan yang membutuhkan resolusi kolektif.

2. Peran Lembaga Pendidikan

Sektor pendidikan formal bertindak sebagai instrumen garda depan dalam internalisasi nilai-nilai perdamaian sejak usia dini. Kebijakan edukasi moderasi beragama perlu diintegrasikan secara terstruktur ke dalam kurikulum pendidikan agama di sekolah, dengan menitikberatkan pada pola pemahaman keagamaan yang berimbang: memperkuat keyakinan spiritual personal sekaligus menumbuhkan penghormatan yang tulus terhadap realitas pluralitas. Lebih lanjut, kurikulum pendidikan multikultural yang mengedukasi peserta didik mengenai diversitas etnis, kebudayaan, dan sistem kepercayaan di Indonesia wajib dikembangkan secara progresif, agar generasi muda tumbuh dengan pola pikir yang inklusif serta berwawasan terbuka. Proses penanaman nilai toleransi sejak fase awal perkembangan anak, baik melalui kurikulum instruksional formal maupun kegiatan ekstrakurikuler, akan membentuk fondasi karakter generasi penerus bangsa yang mengapresiasi perbedaan sebagai sebuah keniscayaan yang bernilai positif.

3. Peran Masyarakat

Komunitas masyarakat selaku basis elemen terbesar dalam struktur bernegara memegang peranan yang tidak kalah vital dalam merawat perdamaian horizontal. Aktivitas sosial yang bersifat lintas agama seperti agenda gotong royong kebersihan lingkungan, penggalangan donasi kemainan bagi penyintas bencana, hingga kerja bakti sosial lainnya dapat diaplikasikan sebagai sarana yang efektif guna mempererat kohesi sosial antar-warga yang berbeda keyakinan. Kemitraan komunal ini mampu menghidupkan kembali nilai gotong royong yang telah lama mengakar dalam kebudayaan Nusantara, di mana sekat-sekat primordialisme agama dan budaya melebur ke dalam ikatan solidaritas kemanusiaan demi menggapai kemaslahatan bersama. Selain itu, pelaksanaan festival budaya kolaboratif yang mengintegrasikan partisipasi ragam kelompok keagamaan dan suku dapat dijadikan sebagai momentum perayaan pluralitas sekaligus medium penguat tali persaudaraan kebangsaan

4. Peran Media Massa dan Media Sosial

Institusi pers dan platform media sosial memiliki daya pengaruh yang luar biasa dalam memformulasi opini publik, sehingga kontribusi mereka dalam merawat kerukunan umat beragama tidak boleh diremehkan. Entitas media wajib secara aktif memproduksi dan mengamplifikasi konten informatif yang menyejukkan, serta memprioritaskan penyebaran narasi positif terkait keberagaman sosial daripada mengeksploitasi isu-isu sensitif yang berpotensi menyulut konflik sektarian. Selain fungsi edukatif

tersebut, institusi media juga mengemban tanggung jawab moral untuk meng-*counter* penyebaran hoaks dan kampanye hitam digital melalui penyajian jurnalisme klarifikasi serta verifikasi data secara akseleratif dan akurat. Melalui pengemasan konten edukasi yang kreatif, media mampu berkontribusi aktif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan urgensi toleransi, sekaligus mempersenjatai publik dengan kecakapan literasi digital agar mampu memfilter informasi yang valid dari propaganda destruktif.

5. Contoh Dialog Praktik Baik Lintas Agama di Indonesia

Pada berbagai wilayah di Nusantara, telah teridentifikasi banyak implementasi praktik baik (*best practices*) yang merefleksikan keberhasilan instrumen dialog lintas agama dalam memelihara stabilitas sosial. Salah satu manifestasi empiris yang paling jamak dijumpai adalah sinergi antar-komunitas keagamaan pada saat perayaan hari besar keagamaan, di mana kelompok pemuda atau pemeluk agama mitra turut berpartisipasi aktif menjaga keamanan serta kelancaran ibadah umat lain, sebagaimana tercermin dalam momentum perayaan Natal, Idulfitri, Nyepi, maupun Waisak di berbagai pusat perkotaan. Eksistensi institusional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang telah beroperasi di hampir seluruh tingkatan provinsi serta kabupaten/kota menjadi representasi riil dari kebijakan struktural dalam melestarikan dialog lintas agama. Lembaga ini secara konsisten mengadakan forum diskusi berkala, kampanye sosialisasi moderasi, serta tindakan mediasi terhadap rupa-rupa gesekan keagamaan yang mencuat di tingkat akar rumput.

Solidaritas kemanusiaan lintas agama dalam skenario penanggulangan bencana alam juga menjadi parameter otentik bahwa nilai empati sanggup melintasi batasan-batasan dogmatis keagamaan. Para relawan kemanusiaan dari beragam identitas keimanan senantiasa bahu-membahu menyalurkan logistik bantuan dan penanganan medis kepada masyarakat terdampak tanpa memedulikan latar belakang spiritual yang dianut oleh penerima manfaat. Di samping itu, rupa-rupa agenda sosiokultural kolaboratif seperti pementasan seni multikultural, sarasehan dialog kebangsaan, hingga program kunjungan edukatif antar-rumah ibadah terus bertumbuh subur di berbagai daerah sebagai wujud nyata dari internalisasi spirit merawat kerukunan melalui interaksi sosial langsung antarumat beragama.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kerukunan umat beragama merupakan fondasi absolut bagi keberlanjutan eksistensi berbangsa dan bernegara di tengah realitas Indonesia yang multikultural, dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari landasan filosofis Pancasila, konstitusi UUD 1945, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dialog lintas agama dan budaya terbukti menjadi instrumen yang efektif dan strategis dalam memelihara stabilitas sosial tersebut, karena mampu mengubah perbedaan teologis dan kultural dari potensi ancaman menjadi ruang saling memahami dan mempercayai antarkelompok masyarakat. Meskipun demikian, upaya perwujudan kerukunan ini masih dibayangi oleh berbagai tantangan kontemporer yang nyata, seperti merebaknya sikap intoleransi dan infiltrasi paham radikalpemanfaatan platform digital secara destruktif demi mengamplifikasi disinformasi serta narasi permusuhan, sekaligus instrumentalisasi sentimen keagamaan demi kepentingan politik praktis, serta masih rendahnya tingkat literasi keagamaan di sebagian lapisan masyarakat.

Mengingat kompleksitas persoalan tersebut, agenda pembangunan dan perawatan kerukunan umat beragama tidak dapat dibebankan kepada satu sektor semata, melainkan menuntut adanya sinergi dan

kolaborasi integratif dari segenap elemen kebangsaan, mulai dari pemerintah, tokoh agama, institusi pendidikan, komunitas masyarakat, hingga sektor media massa dan media sosial, yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi khas yang saling melengkapi. Pada akhirnya, dialog lintas agama dan budaya perlu dipahami bukan sekadar sebagai instrumen reaktif untuk meredam konflik, melainkan sebagai pilar utama bagi persatuan Indonesia yang sejati, sehingga tatanan kehidupan yang damai, harmonis, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moh. Khoiril. "Dialog Antar Umat Beragama di Indonesia: Perspektif A.Mukti Ali." *Jurnal Dakwah* 19, no. 1 (2018): 89–107. <https://doi.org/10.14421/jd.2018.19105>.
- Bestari, Mitra, Dr Koeswinarno, dan M. Hum. *PENANGGUNG JAWAB Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang*. t.t.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Kerangka Hukum Pengakuan Agama dan Kepercayaan dalam Kerangka Kebebasan Beragama di Indonesia." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 113–24. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.669>.
- "Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama." t.t.
- Ferdian, Ferdi. "FUNGSI FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DALAM SISTEM SOSIAL PENCIPTAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT." *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies* 4, no. 2 (2018): 136. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i2.786.
- Hanum, Lathifah, dan Henny Syafriana Nasution. *ANAK DAN TOLERANSI: UPAYA PENANAMAN NILAI MODERASI BERAGAMA DALAM KELUARGA DAN SEKOLAH*. t.t.
- Harjaya Situmeang dan Meditatio Situmorang. "Pengaruh Gerakan Oikumene Terhadap Kerukunan Beragama di Indonesia." *Sabar : Jurnal Pendidikan Agama Kristen dan Katolik* 2, no. 1 (2024): 111–22. <https://doi.org/10.61132/sabar.v2i1.489>.
- Hasan, Moh Abdul Kholiq. *MERAJUT KERUKUNAN DALAM KERAGAMAN AGAMA DI INDONESIA (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)*. 14, no. 1 (t.t.).
- Hermawati, Rina, Caroline Paskarina, dan Nunung Runiawati. "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung." *Umbara* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10341>.
- Ibnu Rusydi dan Siti Zolehah. *Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian*. 28 Januari 2018. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1161580>.
- Kaharuddin, Kaharuddin, dan Muh. Darwis. "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Di Luwu Timur." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 1 (2019): 31–46. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i1.566>.
- Khoir, Mulyanto Abdullah, dan Muhammad Isa Anshory. "Toleransi dan Prinsip-prinsip Hubungan Antarumat Beragama dalam Perspektif Dakwah Islam." *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah* 1, no. 2 (2023): 52–78. <https://doi.org/10.54090/pawarta.302>.
- Latuheru, Angel Christy, Izak Y. M. Lattu, dan Tony Robert Tampake. "Pancasila Sebagai Teks Dialog Lintas Agama dalam Perspektif Hans-Georg Gadamer dan Hans Kung." *Jurnal Filsafat* 30, no. 2 (2020): 150. <https://doi.org/10.22146/jf.49193>.
- Marpuah, Marpuah. "TOLERANSI DAN INTERAKSI SOSIAL ANTAR PEMELUK AGAMA DI CIGUGUR, KUNINGAN." *Harmoni* 18, no. 2 (2019): 51–72. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.309>.
- Maulani, Rayfan Ade, Ismatul Maula, Meutya Vianda Sari, dan Bakti Fatwa Anbiya. "Penguatan Nilai-Nilai Toleransi Beragama Melalui Kegiatan Peace Camp." *Jurnal Riset Agama* 4, no. 2 (2024): 125–

36. <https://doi.org/10.15575/jra.v4i2.34718>.
“Moderasi dakwah di era keterbukaan infor.” t.t.
Muktarruddin, Muktarruddin, dan Muhammad Husni Ritonga. “Peran Tokoh Agama dalam Membangun Moderasi Beragama di Kota Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu.” *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 7, no. 1 (2025): 137–52. <https://doi.org/10.37364/jireh.v7i1.395>.
Munabiah Lestari, Munabiah, dan Musfiah Saidah. “Penanganan Hoaks Keagamaan di Sosial Media Melalui Literasi Digital Milenial.” *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah* 4, no. 1 (2023): 68–94. <https://doi.org/10.19105/meyarsa.v4i1.6764>.
Pursika, I. Nyoman. “KAJIAN ANALITIK TERHADAP SEMBOYAN ”BHINNEKA TUNGGAL IKA”.” *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2009.
Rahim, Abdul, dan Wendy Setiawan. *Pendidikan Multikultural dan Moderasi Beragama dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Kampung Bali, Desa Paya Tusam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat*. t.t.
Ramadhan, Mochammad Rizal. *EKSISTENSI PLURALISME DI INDONESIA: MENYIKAPI PRO-KONTRA PLURALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. t.t.
Rizky P.P. Karo Karo dan Indah Sriulina Br. Ginting. “Upaya Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pada Media Sosial.” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 3 (2021): 138–55. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.410>.
Samuel, Samuel, dan Esther Epin Tumonglo. “Toleransi: Peran Tokoh Agama sebagai Perikat Kerukunan Umat Beragama.” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (2023): 81. <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.14734>.
Sukmayadi, Qolbi Mujahidillah Adzimat. *Generasi Z dalam Komunitas Keagamaan: Potensi Intoleransi Beragama melalui Budaya Eksklusif dalam Memahami Agama*. 10 (2023).
Supriadi, Endang, Ghufron Ajib, dan Sugiarto Sugiarto. “Intoleransi dan Radikalisme Agama: Konstruksi LSM tentang Program Deradikalisasi.” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)* 4, no. 1 (2020): 53–72. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.1.4544>.
Sutrisno, Edy. *POTRET KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DALAM BINGKAI MODERASI BERAGAMA: STUDI KASUS DI DESA SIDODADI, MALANG*. 23, no. 2 (t.t.).
Universitas Sanata Dharma dan SDU Press, ed. *Prosiding Seminar Nasional Sosial dan Humaniora: mengembangkan kehidupan berbangsa yang lebih beradab: 15 Juni 2023, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta*. Cetakan pertama. Seminar Nasional Sosial dan Humaniora. Sanata Dharma University Press, 2023.
Wahid, Abdul. “Moderasi Beragama dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam: Implementasi dalam Pendidikan Multikultural di Indonesia.” *Scholars* 2, no. 1 (2024): 29–36. <https://doi.org/10.31959/js.v2i1.2367>.
Wingarta, I. Putu Sastra, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I. Wayan Mertadana, dan Reda Wicaksono. *PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA*. t.t.
Yunus, Firdaus M., Taslim Hm. Yasin, dan Syamsul Rijal. “Politik Identitas dan Politisasi Agama Dalam Konteks Pemilu di Indonesia.” *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial* 9, no. 2 (2023): 121–37. <https://doi.org/10.29103/jsds.v9i2.12590>.